

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi menurut Adams (dalam Syafri, 2018;8) adalah kemampuan mengkoordinasi berbagai kekuatan yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai suatu kesatuan.

Dari batasan di atas ditemukan ide pokok sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan sosial di dalam satu organisasi.
2. Kekuatan itu di padukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/keseluruhan organisme.

Adapun menurut Siagian Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012;9).

Administrasi berdasarkan definisi ahli di atas dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian usaha yang dilakukan bersama dan saling berkaitan antara satu dan yang lain yang penyelenggaraannya membutuhkan wadah agar dapat mencapai tujuan yaitu organisasi. Penulis mengartikan administrasi sebagai suatu konsep yang belum

terlaksanakan dan akan terwujud dengan menggunakan organisasi, pernyataan tersebut juga didukung oleh beberapa pendapat ahli berikut;

Syafri (2012;11) batasan Administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerja sama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkain kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

White (dalam Syafr, 2012;9) menjelaskan administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha pada setiap kelompok, publik, atau privat, sipil atau militer, skala besar atau skala kecil.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2009;9) administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

Administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengolahan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli, 2005;16)

Selain itu Pasolong (2007;3) didalam bukunya juga mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Sedangkan menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong (2010;7) mendefinisikan administrasi publik adalah :

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengusahaan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Jadi, Administrasi merupakan rangkaian aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kerjasama yang terarah dalam organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien, unsur-unsur diatas akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri di tengah-tengah birokrasi pemerintahan dan akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam melaksanakan tugas Negara.

## **2. Konsep Administrasi Publik**

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2008;2) administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan administrasi publik menurut McCurdy (dalam Keban, 2014;3) bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara, dengan kata lain administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

Jadi administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Harus diakui bahwa ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014;8) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri berikut :

1. Organisasi publik yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi.
2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan system dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

### **3. Konsep Organisasi**

Organisasi yang merupakan alat untuk merealisasikan konsep yang telah dipikirkan pada proses administrasi merupakan hal penting karena disinilah tempatnya orang bisa bekerjasama yang dapat dijadikan alat mengumpulkan orang-orang dengan tujuan yang sama. Penulis mengibaratkan administrasi tanpa organisasi

bagai air tanpa wadah tidak akan sampai kepada yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan beberapa definisi organisasi yang dikemukakan para ahli.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005;25) merumuskan definisi organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara optimal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yan terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Menurut Winardi (2009;15) didalam bukunya menggambarkan dan menjelaskan sebuah organisasi itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Hasibuan (2014;120) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan para ahli terlihat bahwa administrasi dan organisasi adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, seperti yang telah dijelaskan penulis sebelumnya. Organisasi berjalan tergantung pada proses administrasinya. Dalam organisasi prinsip juga diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang, prinsip ini harus dijadikan sebgaai pedoman bagi para penyelenggaranya.

Berikut ini terdapat dua belas prinsip organisasi menurut Siagian (2008;97)

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orng dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah
- e. Adanya kesatuan perintah
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
- l. Penempatan yang sesuai dengan keahlian.

Selain prinsip organisasi juga memiliki beberapa bentuk, dikarenakan organisasi adalah sesuatu yang dinamis, yang menyesuaikan kedinamisannya dengan kedinamisan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun bentuk organisasi menurut Siagian (2008;100) yaitu :

- a. Organisasi Lini
- b. Organisasi Lini dan Staf
- c. Organisasi Fungsional
- d. Organisasi Type Panitia
- e. Organisasi Matriks

Jadi, organisasi sebagai wadah penyatuan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kerja sama antara satu atau beberapa orang yang disebut bawahan yang terstruktur kearah pencapaian tujuan organisasi, definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. Organisasi juga sebagai rangkaian hierarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

#### 4. Konsep Organisasi Publik

Sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;6) organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut E. Wight Bakke (dalam Kusdi, 2009;5) organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi.

2. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.

4. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

## 5. Konsep Manajemen

Dalam mengatur, menyusun dan mengarahkan orang-orang yang ada didalam organisasi, untuk bekerja sama dengan searah, sejalan dalam mencapai tujuan diperlukan manajemen, yang berfungsi yang berfungsi mengarahkan dan mengatur sumber daya manusia seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Siagian (2008;5) mendefinisikan dari dua pandangan yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan

manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Terry (dalam Hasibuan, 2014;3) manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Semakin jelas bahwa manajemen merupakan salah satu hal penting yang diperlukan perannya demi jalannya organisasi, kunci dari manajemen adalah pemimpin dalam organisasi tersebut, karena yang menjalankan manajemen adalah seorang pemimpin didalam organisasi.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2009;47) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Gie (dalam Zulkifli, 2009;16) menyatakan manajemen sebagai sebuah proses memiliki enam fungsi utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Pembuatan Keputusan
3. Pengarahan
4. Pengoordinasian
5. Pengontrolan
6. Penyempurnaan

Dari sekian pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan penggabungan kemampuan dan keterampilan mengembangkan pendekatan dan strategi untuk membangun semangat kerja dengan cara memberikan motivasi atau dorongan agar para personil merasa tidak terbebani dan sukarela untuk bekerja sama sehingga tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya tercapai.

Dapat penulis simpulkan dari beberapa pengertian manajemen diatas , bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain dengan memanfaatkan potensinya dan menggunakan seni sehingga orang lain tersebut tidak merasa terbebani dan merasa rela, tidak terpaksa, dengan pembagian kerja yang sesuai, dan jelas serta feedback yang sesuai dengan kinerja orang lain tersebut. Manajemen ini dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin didalam organisasi karena hanya pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengatur para bawahan.

#### **6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Cardoso (2003;4) manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan internasional.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membentuk terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara (2011;10) manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk menangani masalah karyawan atau pegawai. Manajemen sumber daya manusia harus menunjang aktivitas organisasi agar mencapai tujuan dengan hasil yang baik.

Fungsi MSDM yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012;12-13) antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan  
Perencanaan (*planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi.
3. Pengarahan  
Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
4. Pengendalian  
Pengendalian (*Controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sama sesuai dengan rencana.
5. Pengadaan  
Pengadaan (*Procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
6. Pengembangan  
Pengembangan (*Development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknik, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi

Kompensasi (*Compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*Separation*) adalah putusannya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Menurut Martoyo (2009;19) tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

1. Tujuan organisasional adalah untuk tercapainya tujuan efektivitas maksimal sebuah organisasi.
2. Tujuan fungsional adalah bahwa secara fungsional tujuannya harus sesuai dengan organisasi yang lebih besar.
3. Tujuan sosial yaitu setiap organisasi apapun tujuannya harus mengikat akibatnya bagi kepentingan masyarakat umum.
4. Tujuan personal atau individual dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dari administrasi karena pada dasarnya manajemen memang alat pelaksana utama

administrasi dan manajemen sumber daya manusia menjadi alat penggerak untuk sebuah organisasi dalam mencapai tujuan.

## 7. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memperoleh, dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Menurut Sudjana (2006;7) evaluasi adalah kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan.

Menurut Yusuf (2000;3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan didepan. Menurut Boyle (dalam Suharto, 2005;120) sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis yang telah direncanakan dimana hasil evaluasi tersebut dimasukkan menjadikan perencanaan kedepan lebih baik lagi.

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan,

memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik lagi. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan daripada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut Sudjana (2006;17-18) dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan untuk menetapkan baik buruknya suatu kebijakan karena kegiatan tersebut termasuk pada keputusan. Evaluasi kebijakan bukan kegiatan untuk mengukur karakteristik unsur-unsur kebijakan, seperti komponen, proses, dan hasil kebijakan, sebab kegiatan itu lebih tepat apabila dikategorikan kedalam pengukuran.

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2008:166) secara umum mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan/program. Boyle (dalam

Suharto, 2006;120) mengatakan bahwa evaluasi berusaha mendefinisikan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penetapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Menurut Dunn (2003;609-610) fungsi evaluasi yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan terget
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan pendapat Dunn diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan tersebut.

## **8. Konsep Ketertiban Umum**

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang pengertiannya menurut Poerwadarminta (1987) adalah:

Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara dalam sidang (diskusi, rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang

bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur yang baik.

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa didalam konsisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tertib.

Menurut J.S Badudu (1987) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yangng berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Sedangkan pengertian dalam masyarakat menurut Poerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).

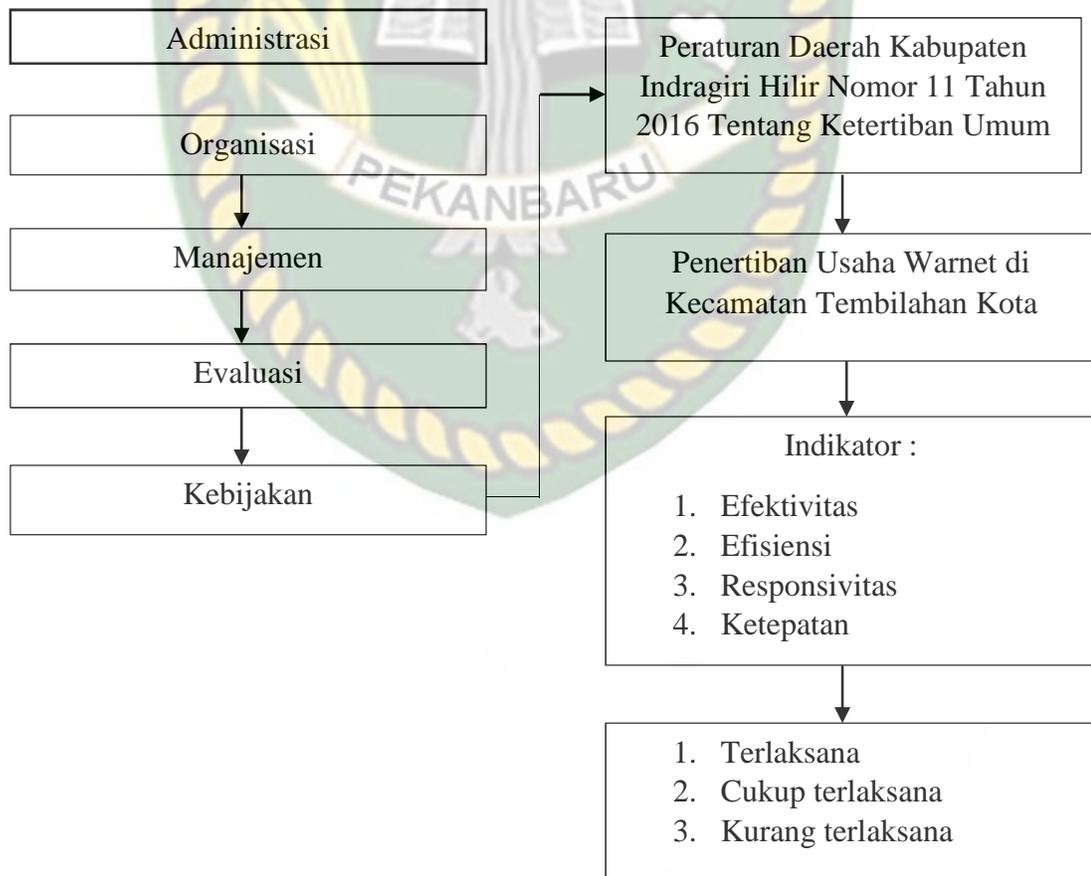
Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa : ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan

dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### B. Kerangka Pikiran

**Gambar 1.1 : Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan Kota).**



Sumber: Modifikasi Penulis 2018

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: Di duga Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir bisa berjalan dengan baik apabila indikator terlaksana:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Responsivitas
4. Ketepatan

### **D. Konsep Operasional**

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat dengan suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur.

Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.
3. Manajemen adalah seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan tanpa merasa terpaksa atau dengan senang hati.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan dimasa depan.
6. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan/program.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum adalah salah satu produk hukum pemerintah daerah Indragiri Hilir yang mengatur tentang Ketertiban Umum.

8. Ketertiban Umum adalah menciptakan ketertiban pada lingkungan wilayah tempat tinggal warga sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan nyaman.
9. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan, atau apakah mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
10. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
11. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003;437).
12. Ketepatan berarti kelayakan. Kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

#### **E. Operasional Variabel**

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di kecamatan tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun penjabaran variabel-variabel evaluasi penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilihan Kota tersebut kedalam operasional variabel dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1 : Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Penertiban Usaha Warnet di Kecamatan Tembilihan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi kebijakan adalah suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program (Dunn, 2003;608)	Evaluasi	1. Efektifitas  2. Efisiensi	1. Batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai jam 24.00 WIB 2. Tidak menerima anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam sekolah 3. Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah  1. Sosialisasi terhadap	1. Terlaksana 2. Cukup Terlaksana 3. Kurang Terlaksana

1	2	3	<p>Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016</p> <p>2. Memberikan informasi terhadap dampak bermain internet tanpa pengawasan</p> <p>3. Memberikan informasi sanksi terhadap warnet yang melanggar</p>	<p>1. Terlaksana</p> <p>2. Cukup Terlaksana</p> <p>3. Kurang Terlaksana</p>
		<p>3. Responsivitas</p> <p>4. Ketepatan</p>	<p>1. Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016</p> <p>2. Respon masyarakat terhadap adanya pelanggaran</p> <p>3. Sikap masyarakat terhadap kebijakan</p> <p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016</p> <p>2. Keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016</p>	<p>1. Terlaksana</p> <p>2. Cukup Terlaksana</p> <p>3. Kurang Terlaksana</p> <p>1. Terlaksana</p> <p>2. Cukup Terlaksana</p> <p>3. Kurang Terlaksana</p>

			3. Manfaat pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016	
--	--	--	--	--

#### **F. Teknik Pengukuran**

Untuk mengetahui bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, diukur melalui beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini juga akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator dijelaskan satu persatu yang juga menjadi poin-poin dari opini masyarakat itu sendiri. Kategori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu: Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana.

#### **G. Ukuran Variabel**

Ukuran variabel evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada interval 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada interval 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator penetapan standar berada pada interval 1-33%.

### **Indikator Ukuran Variabel**

Adapun ukuran indikator adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada interval 1-33%

2. Dilihat dari efisiensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha

warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada interval 1-33%

3. Dilihat dari responsivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada interval 1-33%

4. Dilihat dari ketepatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum terhadap penertiban usaha

warnet di Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, pengukurannya adalah :

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila dua dari tiga item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada pada interval 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden berada interval 1-33%

